

## ABSTRAK

### **EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SINAR MAS MULTI FINANCE (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus- BPSK/2019)**

**Agus Pratama\***

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK, bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK.

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah tunduk kepada KUHPerddata sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan dan jika sudah lewat waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi hutangnya debitur tidak melunasi, maka objek jaminan akan dilelang. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.

**Kata Kunci : Eksekusi, Fidusia, Wanprestasi.**

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **EXECUTION OF THE OBJECT OF FIDUCIARY GUARANTEE DUE TO Default In the FINANCING AGREEMENT BY THE FINANCING COMPANY PT. SINAR MAS MULTI FINANCE (Analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)**

**Agus Primary\***

*Consumer financing institutions are one of the alternative sources of financing to meet consumer needs for the consumer goods they need.*

*The formulation of the problem in this thesis is how the debtor defaults in the fiduciary agreement between the debtor and the financing company as creditor in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus-BPSK, how is the execution of the fiduciary guarantee object carried out by the financing company as the creditor, how is legal protection against the debtor for the execution of the object of fiduciary guarantee by the financing company in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK.*

*This study uses a library research method to examine secondary data by analyzing the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively.*

*The conclusion from the discussion is that the legal arrangement for default in the fiduciary agreement between the debtor and the financing company as creditor in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus-BPSK is subject to the Civil Code in accordance with the conditions for the validity of the agreement Article 1319, Article 1320 and Article 1338 followed and followed by the provisions in Presidential Decree 61 of 1988 concerning Financing Institutions and Presidential Regulation no. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. The form of legal protection due to the execution of the object of fiduciary security carried out by the company and if the time given by the financing company to pay off the debtor's debt does not pay off, then the object of the guarantee will be auctioned. The judge's legal considerations in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK is a legal relationship between consumers and finance companies, namely a financing agreement, so that if one party does not fulfill or violates the agreement, it will cause breach of promise/default and auction fiduciary installments. (car) is not a consumer dispute problem, then it is the authority of the General Court to resolve it, it is not the authority of the Consumer Dispute Settlement Agency, so that the Consumer Dispute Settlement Agency in deciding cases is not in accordance with the existing authority.*

**Keywords: Execution, Fiduciary, Default.**

*\*Students of the Postgraduate Law Program at the Islamic University of North Sumatra*